Keefektifan Perencanaan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Kurikulum Merdeka pada Program Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga SMK N 1 Karanganyar

Dina Rosiana[1], Sohidin[2]
[1,2]Universitas Sebelas Maret, Indonesia
E-mail: dinarosiana@student.uns.ac.id

Article Info
Article History
Received: 2024-09-07
Revised: 2024-10-27
Published: 2024-11-05

Keywords:
Field Work Practice; Merdeka Curriculum; Effectiveness.

Abstract
This study aims to obtain information regarding the effectiveness of the planning and implementation of Field Work Practice (PKL) under the Merdeka Curriculum in the Financial Accounting Expertise Program at SMK N 1 Karanganyar. This research is a qualitative descriptive study utilizing interviews, documentation, and observation techniques, employing the Countenance Stake evaluation method. The informants for this research are the Vice Principal of Curriculum, the Head of the AKL Competency Expertise, and the PKL supervising teachers from the AKL Competency Expertise. Based on the Countenance Stake evaluation method, the planning and implementation of PKL under the Merdeka Curriculum are divided into three components: antecedents, transactions, and outcomes. Decision-making or assessment for evaluation is categorized into five levels: very effective, effective, moderately effective, less effective, and very ineffective. This categorization is based on the comparison between objective standards and the conditions of the Field Work Practice under the Merdeka Curriculum at SMK N 1 Karanganyar in the Financial Accounting Expertise Program. According to the objective standards of the Merdeka Curriculum PKL, there are 8 aspects containing 26 sub-aspects. Based on the evaluation research of the planning and implementation of PKL under the Merdeka Curriculum at SMK N 1 Karanganyar in the Financial Accounting Expertise Program, it is concluded that 21 sub-aspects have met the standards, while 5 sub-aspects have not yet met the objective standards. Thus, the planning and implementation of PKL under the Merdeka Curriculum at SMK N 1 Karanganyar in the Financial Accounting Expertise Program falls under the "very effective" category with a percentage of 80.77%.

Artikel Info
Sejarah Artikel
Diterima: 2024-09-07
Direvisi: 2024-10-27
Dipublikasi: 2024-11-05

Kata kunci:
Praktik Kerja Lapangan; Kurikulum Merdeka; Efektivitas.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas perencanaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Kurikulum Merdeka pada Program Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga SMKN 1 Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan menggunakan metode evaluasi Countenance Stake. Informan dari penelitian ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ketua Kompetensi Keahlian AKL, dan guru pembimbing PKL dari Kompetensi Keahlian AKL. Berdasarkan metode evaluasi Countenance Stake, perencanaan pelaksanaan PKL Kurikulum Merdeka dibagi menjadi tiga komponen, yaitu *antecedent*, *transactions*, dan *outcomes*. Pengambilan keputusan atau penilaian untuk evaluasi dikategorikan ke dalam lima tingkatan yaitu sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan sangat kurang efektif. Kategorisasi ini didasarkan pada perbandingan standar objektif dengan kondisi Prakti Kerja Lapangan Kurikulum Merdeka di SMK N 1 Karanganyar pada Program Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga. Berdasarkan standar objektif PKL Kurikulum Merdeka terdapat 8 aspek yang di dalamnya terdapat 26 sub-aspek. Berdasarkan penelitian evaluasi pada perencanaan pelaksanaan PKL Kurikulum Merdeka di SMK N 1 Karanganyar pada Program Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga, disimpulkan bahwa terdapat 21 sub-aspek telah memenuhi dan 5 sub-aspek lainnya belum memenuhi standar objektif, sehingga perencanaan pelaksanaan PKL Kurikulum Merdeka di SMK N 1 Karanganyar pada Program Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga masuk pada kategori sangat efektif dengan persentase 80,77%.

I. PENDAHULUAN

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan Negara Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di era abad ke21. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan meningkatkan daya saing yang tinggi dimana hal tersebut sudah menjadi tuntutan pembangunan untuk menuju pada kesejahteraan, sehingga ketika indeks pembangunan manusia di

Indonesia mengalami kemerosotan, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia juga menurun dan mengakibatkan daya saing bangsa Indonesia juga menurun. Pendidikan menjadi sarana yang mampu menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkompeten. Jadi, kemerosotan daya saing bersumber dari kualitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah (Salahuddin, Akos, & Hermawan, 2018). Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaaan dan peraturan mengenai pelaksanaan pembelajaran yang baik agar mencapai kualitas pendidikan di Indonesia yang bermutu. Di Indonesia pendidikan memiliki pedoman untuk mengatur segala perencanaan dan perangkat pembelajaran, pedoman tersebut yaitu kurikulum (Oktaviani & Ramayanti, 2023).

Komponen dari sistem pendidikan nasional harus senantiasa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi, Ahmad menyatakan bahwa salah satu komponen penting dari sistem pendidikan adalah kurikulum (Munandar & Amiruddin, 2020). Kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman serta pegangan tentang jenis, isi, serta proses pendidikan (Jamjemah, dkk., 2022). Oleh karena itu, perubahan dalam kurikulum dilakukan berdasarkan atas perkembangan zaman, kebutuhan pendidikan, serta kebutuhan global. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan dan menerapkan dua belas kurikulum yang berbeda sejak tahun 1947 (Iramdan & Manurung, 2019). Kurikulum terbaru yaitu Kurikulum Merdeka, dihadirkan guna untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.

Kurikulum Merdeka dimaknai sebagai desain pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dengan tenang, santai, menyenangkan, bebas stress dan bebas tekanan, untuk menunjukkan bakat alaminya (Rahayu, dkk., 2022). Oleh karena itu, Kurikulum Merdeka disini adalah kemerdekaan berpikir atau belajar secara bebas. Kurikulum Merdeka menurut Stiawan (Jamjemah et al., 2022) memberikan kemerdekaan kepada kepala sekolah beserta guru dalam memilih pembelajaran dengan pembelajaan berdiferensiasi sesuai dengan profil peserta didik yang berorientasi pada pembelajaran mulok.

SMK merupakan satuan pendidikan formal yang bertujuan menyiapkan lulusannya untuk memiliki keunggulan dalam dunia kerja. Hal ini sesuai dengan posisi SMK menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa "Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan sebagai lanjutan dari pendidikan dasar yang bertujuan mempersiapkan peserta didik terutama dalam bidang pekerjaan tertentu". Oleh karena itu, tujuan utama dari pendidikan formal SMK ini adalah untuk mencetak generasi yang siap untuk memasuki dunia kerja dan memiliki keahlian yang sesuai dengan kompetensi yang diminatinya. Oleh karena itu, Sekolah Menengah Kejuruan menganut Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang mana peserta didik diberikan bekal pengetahuan beserta keterampilan dalam dunia kerja (Shintawati & Anriani, 2022).

Menurut Arif W. Santosa (2013) kenyataan di lapangan masih banyak pihak industri yang mengeluhkan bahwa lulusan SMK masih belum sesuai dengan harapan dunia kerja, sehingga masih banyak lulusan SMK yang masih menganggur. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan utama dari pendidikan formal SMK itu sendiri. Berdasarkan survei BPS tahun 2023 menyatakan bahwa angka pengangguran tertinggi berasal dari lulusan SMK selama tiga tahun berturut-turut. Berikut merupakan tabel data pengangguran di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
	2021	2022	2023
SD Ke Bawah	3,61%	3,59%	2,56%
SMP	6,45%	5,95%	4,78%
SMA Umum	9,09%	8,57%	8,15%
SMA Kejuruan	11,13%	9,42%	9,31%
Diploma I/II/III	5,87%	4,59%	4,79%
Universitas	5,98%	4,80%	5,18%

Kesenjangan antara hasil pendidikan kejuruan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat terlihat dari tingkat pengetahuan dan penguasaan keterampilan lulusan SMK yang masih belum sepadan dengan bidang-bidang pekerjaan yang dibutuhkan dunia kerja menjadi sebab meningkatnya jumlah lulusan SMK yang menganggur dan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazah kejuruannya (Anggraeni, 2013). Salah satu usaha SMK dalam menyiapkan serta mengembangkan peserta didik yang berkualitas serta memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kejuruannya yaitu melalui mata pelajaran Praktik Kerja Lapangan (PKL).

PKL adalah mata pelajaran yang berperan sebagai inti kejuruan bagi peserta didik di SMK sekaligus mata pelajaran yang mampu

meningkatkan kualitas peserta didik sesuai dengan keahliannya. PKL merupakan bentuk pembelajaran peserta didik yang dilaksanakan di dunia kerja untuk mengasah dan memperkuat kompetensi sesuai dengan bidangnya yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik dalam rangka untuk mempersiapkan diri terjun ke dunia kerja.

Keefektifan menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia berarti menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, hasil yang makin mendekati sasaran berarti tinggi efektivitasnya. Suatu usaha dapat dikatakan sebagai efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuan secara ideal. Oleh karena itu, identifikasi keefektifan perencanaan pelaksanaan PKL Kurikulum Merdeka disini ditujukan untuk mengetahui kemungkinan tingkat keberhasilan perencanaan dalam usaha pencapaian tujuan dari pelaksanaan PKL Kurikulum Merdeka itu sendiri. Konsep manajemen sekolah, Enco Mulyasa memberikan definisi terhadap keefektifan sebagai situasi adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju (Bararah, 2017). Jadi, keefektifan merupakan tingkat keberhasilan yang diukur dengan tingkat ketercapaian tujuan yang telah direncanakan.

Keefektifan perencanaan erat kaitannya dengan keberhasilan pencapaian tujuan dari program yang telah direncanakan untuk dilaksanakan. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada pihak sekolah dalam menentukan kebijakan atas pelaksanaan pembelajaran, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, namun harus tetap memenuhi aspek-aspek dari kebijakan pemerintah agar tujuan pembelajaran tetap terpenuhi dan pelaksanaan PKL tetap sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan dan memastikan bahwa peserta didik menerima pembelajaran yang bermutu. Dengan demikian, walaupun terdapat kebebasan dalam merancang kurikulum, sekolah tetap diharapkan untuk mengikuti pedoman dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan norma dan standar yang berlaku.

Untuk mengetahui keefektifan dari perencanaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Kurikulum merdeka pada Program Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga di SMK N 1 Karanganyar, diperlukan adanya evaluasi agar dapat melihat ketercapaian tujuan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kebijakan Praktik Kerja Lapangan pada periode selanjutnya. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi *Countenance Stake* dimana evaluasi dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan suatu program sehingga dapat dijadikan pertimbangan setelahnya.

Penelitian dengan kajian partisipasi Du/Di dengan peningkatan mutu lulusan SMK dilakukan oleh Ismail (2022) dengan hasil bahwa partisipasi Du/Di pada kegiatan PKL terhadap peningkatan mutu lulusan di Gorontalo berada pada kategori cukup, sehingga pelaksanaan PKL cukup berpengaruh terhadap mutu lulusan serta kegiatan rekrutmen kerja. Oleh karena itu, pelaksanaan PKL dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan peserta didik yang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan perencanaan pelaksanaan PKL sangat mempengaruhi kualitas lulusan SMK serta kegiatan rekrutmen kerja, sehingga dibutuhkan perencanaan yang matang dan efektif untuk memaksimalkan pelaksanaan pengimplementasian kurikulum dalam mata pelajaran PKL, dimana hal tersebut dapat diidentifikasi menggunakan model evaluasi *Countenance Stake*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan dari perencanaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Kurikulum Merdeka di SMK N 1 Karanganyar dengan menggunakan model evaluasi *Countenance Stake*.

Mengingat pentingnya implementasi kurikulum terhadap proses pembelajaran, penerapan Kurikulum Merdeka terhadap mata pelajaran Praktik Kerja Lapangan (PKL) dirasa cukup krusial bagi peneliti karena banyaknya perubahan dalam sistematika dan pengimplementasiannya. Dengan melakukan penelitian ini, maka keefektifan dari perencanaan pelaksanaan PKL Kurikulum Merdeka di SMK N 1 Karanganyar mampu diidentifikasi sehingga perencanaan dapat dilakukan dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat diusahakan, sehingga kualitas lulusan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul "Keefektifan Perencanaan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Kurikulum Merdeka pada Program Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga SMK N 1 Karanganyar".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi evaluasi Countenance Stake dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis keefektifan perencanaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Kurikulum Merdeka. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber utama dari wakil kepala sekolah, guru akuntansi, dan guru pembimbing PKL pada Program Keahlian AKL. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive.

Efektivitas diukur berdasarkan pencapaian tujuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan standar objektif yang mencakup beberapa komponen: *antecedent*, *transactions*, dan *outcomes*. Komponen-komponen ini mencakup administrasi, pembekalan, pembimbingan, serta pencapaian hasil melalui asesmen dan laporan. Efektivitas perencanaan pelaksanaan PKL diukur dengan persentase standar objektif yang tercapai. Kriteria efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Sangat Efektif: p > 80
2. Efektif: 60 < p ≤ 80
3. Cukup Efektif: 40 < p ≤ 60
4. Kurang Efektif: 20 < p ≤ 40
5. Sangat Kurang Efektif: p ≤ 20

P = Persentase

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMK N 1 Karanganyar dengan subjek penelitian Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum, guru akuntansi, dan guru pembimbing PKL program keahlian AKL. Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada topik penelitian mengenai keefektifan perencanaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Kurikulum Merdeka, dimana hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Penelitian mengenai keefektifan perencanaan pelaksanaan PKL Kurikulum Merdeka ini menggunakan metode evaluasi *countenance stake*, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini didasarkan pada tiga aspek yaitu *antecedent*, *transactions*, serta *outcomes* yang disesuaikan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Tabel 2. Hasil

Komponen	Standar Objektif	Memenuhi (M)/ Tidak Memenuhi (TM)	Keterangan
Antecedent	Pengelolaan PKL		
	1) Administrasi naskah kerjasama sekolah dengan industri	M	Terdapat 56 naskah kerjasama sekolah dengan setiap dunia industri tempat peserta didik melaksanakan PKL
	2) Penempatan PKL di industri bagi peserta didik kelas III	M	Sekolah telah menentukan beberapa jenis dunia industri untuk melaksanakan PKL bagi peserta didik kelas III
	3) Presentasi hasil PKL oleh setiap peserta didik	TM	Pihak sekolah tidak mengadakan dan menyajikan presentasi hasil PKL kepada peserta didik
	Implementasi Kurikulum Merdeka		
	1) Perencanaan pelaksanaan PKL sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKL Kurikulum Merdeka	M	Perencanaan pelaksanaan PKL di SMK N 1 Karanganyar telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKL Kurikulum Merdeka
	2) Adanya sinkronisasi/mapping kurikulum bersama dengan dunia industri	M	SMK N 1 Karanganyar pada program keahlian AKL telah melaksanakan sinkronisasi/mapping kurikulum, namun hanya memilih dua industri sebagai sampel yaitu accounting public dan bank bri.
	Pembekalan		
	1) Pemberkalan pembelajaran regular	M	Sekolah telah melaksanakan pembekalan pembelajaran regular dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri
	2) Pemberkalan sebelum keberangkatan	M	Sekolah telah melaksanakan pemberkalan kepada peserta didik yang akan melaksanakan PKL sebelum mereka diberangkatkan
	3) Memberikan materi pembekalan PKL meliputi: (a) karakteristik budaya kerja di dunia kerja; (b) aturan kerja di dunia kerja; (c) orientasi lingkungan multikultural; (d) kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup (k3lh/ssr) lokasi PKL; (f) penyusunan laporan kegiatan harian maupun laporan akhir; (g) penilaian akhir.	M	Sekolah telah memberikan pembekalan kepada peserta didik dengan materi tersebut. Sekolah juga mengundang guru tamu yang mampu menjelaskan mengenai karakteristik budaya kerja, serta orientasi lingkungan kerja kepada peserta didik.
	Pembimbing dan instruktur		
	1) Pembimbing PKL berupa guru atau beberapa orang guru yang bertanggung jawab atas ketercapaian kompetensi peserta didik.	TM	Pembimbing PKL berupa guru yang atau beberapa guru, namun tidak ditunjuk untuk bertanggung jawab atas ketercapaian kompetensi peserta didik selama melaksanakan PKL dikarenakan ketidak etisan dengan pihak industri.
	2) Guru pembimbing PKL terdiri dari unsur guru mata pelajaran kejuruan (termasuk matematika, bahasa inggris, kewirausahaan, dan mata pelajaran pilihan) dan guru mata pelajaran umum	M	Guru pembimbing PKL di SMK N 1 Karanganyar pada program keahlian AKL terdiri dari semua guru yang mengajar di kelas 12 pada program keahlian AKL.
	3) Guru pembimbing mengawasi proses kerja pada dunia kerja	M	Guru pembimbing telah mengawasi proses kerja pada dunia industri, bahkan peserta didik diperkenankan untuk menanyakan kepada pembimbing mengenai suatu pekerjaan yang tidak dimengerti oleh peserta didik selama melaksanakan PKL di dunia industri.
	4) Pembimbingan pada satu lokasi PKL dapat dilaksanakan oleh satu orang guru atau beberapa orang guru yang berkolaborasi	M	Pembimbingan pada satu lokasi dapat dilaksanakan oleh satu orang guru atau beberapa guru dan saling berkolaborasi.
	5) Instruktur PKL merupakan pembimbing dari pihak dunia kerja yang bertindak untuk mengarahkan serta membimbing peserta didik selama melaksanakan pekerjaannya di dunia industri	M	Terdapat pembimbing PKL yang berasal dari dunia kerja yang bertindak untuk mengarahkan dan membimbing peserta didik selama melaksanakan PKL di dunia industri.
	6) Pembimbing PKL serta instruktur PKL berkolaborasi dalam pembelajaran PKL peserta didik, yaitu penyusunan rencana program dan kompetensi pelaksanaan (kehadiran dan pelaksanaan kerja), serta asesmen PKL	M	Pembimbing dan instruktur PKL telah berkolaborasi dalam penyusunan, pembelajaran, penyusunan rencana program, serta pelaksanaan, dan asesmen peserta didik.
	7) Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan PKL	M	Sarana dan prasarana di SMK N 1 Karanganyar sudah sangat lengkap dalam membantu mendukung pelaksanaan PKL
Transactions	CP/ATP		
	1) Penduanan CP/ATP yang dilaksanakan oleh SMK bersama dengan dunia industri	M	Guru telah membuat Cp/ATP yang dilaksanakan bersama dengan dunia industri
	Proses PKL		
	1) Waktu pelaksanaan PKL 6 bulan	M	PKL di SMK N 1 Karanganyar telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKL Kurikulum Merdeka yaitu selama 6 bulan.
	2) Pelaksanaan PKL di semester 5 atau 6	M	PKL Kurikulum Merdeka di SMK N 1 Karanganyar telah dilaksanakan oleh peserta didik di semester 6
	3) Monitoring oleh pembimbing minimal 1 bulan sekali	M	Monitoring dari pembimbing dilaksanakan oleh pembimbing PKL setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali
	Praktik kerja siswa di industri		
	1) Pengenalan dunia industri kepada siswa	TM	Tidak terdapat pengenalan dunia industri terhadap peserta didik ketika mereka melaksanakan PKL oleh instruktur PKL, namun peserta didik diperbolehkan untuk mencari tahu sendiri dengan melakukan survei sebelum mereka melaksanakan PKL.
	2) Pekerjaan yang dilatihkan di dunia industri berdasarkan kompetensi program keahlian siswa	M	Pekerjaan yang dilatihkan di dalam dunia industri disesuaikan dengan kompetensi program keahlian akuntansi, yaitu dilakukan dengan cara memilah dari instansi (hanya menerima sanstat dan kantor pos) sebelumnya diterapkan di bank dan perusahaan yang jelas sesuai dengan kompetensi keahlian akuntansi.
	3) Penggunaan peralatan dan bahan praktik berstandar industri	M	Peserta didik di SMK N 1 Karanganyar menggunakan fasilitas peralatan dan bahan praktik berstandar industri.
	4) Pengisian jurnal oleh siswa dari pekerjaan yang dilatihkan	M	Peserta didik telah diberikan buku jurnal dan telah melakukan pengisian pada buku jurnal selama melaksanakan PKL Kurikulum Merdeka di dunia industri.
Outcomes	Pencapaian program		
	1) Asesmen instruktur dunia industri	M	Peserta didik mendapatkan penilaian dari instruktur dunia industri selama mereka melaksanakan PKL Kurikulum Merdeka
	2) Penyusunan laporan PKL	TM	Peserta didik AKL di SMK N 1 Karanganyar diwajibkan untuk menyusun laporan PKL setelah mereka melaksanakan PKL di dunia industri, namun untuk tidak menjadikan laporan PKL tersebut sebagai penilaian peserta didik.
	3) Presentasi Laporan PKL	TM	Peserta didik AKL di SMK N 1 Karanganyar tidak melaksanakan presentasi laporan PKL setelah melaksanakan PKL, dikarenakan sudah tidak ada waktu. Hal ini dikarenakan PKL Kurikulum Merdeka di SMK N 1 Karanganyar dilaksanakan pada semester 6, sehingga setelah peserta didik selesai melaksanakan PKL mereka sudah harus melaksanakan purna studi (kelulusan).

1. Komponen Antecedent

Pada komponen *antecedents* terdapat empat aspek dan terdapat 14 sub-aspek, dimana dari 15 sub-aspek tersebut, 12 diantaranya memenuhi standar objektif dan 2 sub-aspek tidak memenuhi standar objektif. 2 sub-aspek yang tidak memenuhi standar objektif tersebut adalah sub-aspek presentasi hasil PKL oleh setiap peserta didik pada aspek pengelolaan PKL serta pembimbing PKL yang bertanggung jawab atas ketercapaian kompetensi peserta didik pada aspek pembimbing dan instruktur.

2. Komponen Transaction

Pada komponen *transactions* terdapat 3 aspek yang di dalamnya terdapat 8 sub-aspek, dimana hasil analisis data penelitian perencanaan pelaksanaan PKL Kurikulum Merdeka di SMK N 1 Karanganyar dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 sub-aspek yang memenuhi standar objektif dan 1 sub-aspek yang tidak memenuhi standar objektif PKL Kurikulum Merdeka. Sub-aspek yang tidak memenuhi standar objektif tersebut adalah pengenalan dunia industri kepada siswa pada aspek praktik kerja peserta didik di industri.

3. Komponen *Outcomes*

Pada komponen *outcomes* hanya terdapat satu aspek dan tiga sub-aspek sebagai standar objektif penilaian, dimana di SMK N 1 Karanganyar pada program keahlian AKL hanya terdapat satu sub-aspek yang digunakan sebagai penilaian yaitu asesmen instruktur dunia industri, sedangkan 2 sub-aspek yang tidak digunakan sebagai penilaian yaitu penyusunan laporan PKL serta presentasi laporan PKL.

4. Keefektifan

Berdasarkan seluruh komponen evaluasi terdapat 8 aspek dan 26 sub-aspek yang menjadi standar objektif PKL Kurikulum Merdeka. Dari 26 sub-aspek tersebut, pelaksanaan PKL Kurikulum Merdeka di SMK N 1 Karanganyar telah memenuhi sebanyak 21 sub-aspek, sehingga persentase sub-aspek yang memenuhi standar objektif PKL Kurikulum Merdeka di SMK N 1 Karanganyar pada program keahlian AKL adalah 80,77%. Berdasarkan kriteria penilaian keefektifan, persentase 80,77% tergolong pada kriteria sangat efektif.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 aspek dan 26 sub-aspek yang menjadi sstandar objektif PKL Kurikulum Merdeka. Dari keseluruhan sub-aspek tersebut, pelaksanaan PKL Kurikulum Merdeka di SMK N 1 Karanganyar telah memenuhi sebanyak 21 sub-aspek, sehingga persentase sub-aspek yang memenuhi standar objektif PKL Kurikulum Merdeka di SMK N 1 Karanganyar pada Program Keahlian AKL adalah 80,77%. Berdasarkan kriteria penilaian keefektifan, persentase 80,77% tergolong pada kriteria sangat efektif.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Keefektifan Perencanaan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Kurikulum Merdeka pada Program Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga.

DAFTAR RUJUKAN

Bararah, I. (2017). Efektifitas Perencanaan Pembelajaran dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Jurnal Mudarrisuna* , *7*(1), 131–147.

Iramdan, & Manurung, L. (2019). Sejarah Kurikulum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , *5*(2), 88–95.

Jamjemah, Tomo, D., Erlina, & Hartoyo, A. (2022). Analisis Kesiapan Guru Dalam Melaksanakan Pembelajaran Kurikulum Merdeka di SDN 47 Penanjung Sekadau. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa* , *8*(2), 119–127. https://doi.org/10.31932/jpdp.v8i2.1722

Munandar, A., & Amiruddin. (2020). Analisis Penerapan Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Kimia SMA Negeri 3 Kota Bima. *Jurnal Pendidikan Kimia Dan Ilmu Kimia* , *3*(2), 1–7.

Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penlelitian Kualitatif (Teori dan APlikasi disertai Contoh Proposal)* (1st ed). UPN "Veteran" Yogyakarta Press .

Oktavia, F. T. A., Maharani, D., & Qudsiyah, K. (2023). Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka

Belajar Pada Pembelajaran Matematika di SMK Negeri 2 Pacitan. *Jurnal Pendidikan Matematika* , *4*(1), 14–23.

Oktaviani, S., & Ramayanti, F. (2023). Analisis Kesiapan Sekolah dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, *7*(3), 1454–1460. https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i3.5156

Permana, P. S., & Sukoco. (2017). Efektivitas Manajemen Praktik Kerja Industri di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *5*(2), 199–211. http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp

Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, *6*(4), 6313–6319. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237

Salahuddin, Akos, M., & Hermawan, A. (2018). Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Sumber Daya

Manusia dan Sarana Prasarana di MTSN Banjar Selatan 2 Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, *2*(1), 1–13. http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus

Setiawati, F. (2022). Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum terhadap Pembelajaraan di Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (JMPI)* , *7*(1), 1–17.

Shintawati, & Anriani, N. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada SMK Muhammadiyah 2 Tangerang. *Journal of Social Community*, *7*(2), 130–141.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20, 1 (2003).